

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah)**

Disusun Oleh:

YAN CHENDIYOSY

NIT. 17263046

Jurusan Manajemen

Disetujui sebagai salah satu syarat
untuk menempuh Ujian Skripsi
Tahun Akademik 2020/2021

Yogyakarta, 11 Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Haryo Budhiawan, S.H., M.Si.

NIP. 19570311 198910 1 001

Pembimbing II



Sarjita, S.H., M.Hum.

NIP. 19660908 199203 1 004

INTISARI

Sengketa pertanahan dengan tipologi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah merupakan pengaduan sengketa yang banyak diadukan pada Kantor Pertanahan. Tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terjadi karena adanya sertipikat ganda dimana satu bidang tanah diuraikan dengan 2 sertipikat atau lebih yang berlainan data baik subjek maupun objeknya. Oleh karena itu diperlukan suatu penyelesaian kasus pertanahan. Adanya kelemahan pada penyelesaian kasus pertanahan melalui jalur litigasi membuat masyarakat mulai beralih kepada penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi pada Kantor Pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris melalui pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dan strategi penyelesaian kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi serta mencari tahu proses transisi penerapan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agraria dengan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/Ka. BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah.

Kata Kunci: Sengketa, Mediasi, Peraturan

ABSTRACT

Land disputes with overlapping typologies of ownership of land rights are dispute complaints that are often reported to the Land Office. The overlapping ownership of land rights occurs due to the existence of multiple certificates where one plot of land is described with 2 or more certificates with different data, both subject and object. Therefore we need a settlement of land cases. The existence of weaknesses in the settlement of land cases through litigation has made people begin to turn to alternative dispute resolution, namely mediation at the Land Office. This research is a legal research with an empirical method through a case approach. This study aims to find out the problems and strategies for resolving cases of overlapping land rights ownership through mediation and to find out the transition process for the application of new regulations, namely the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs with Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia (Permen ATR/Ka. BPN). Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases at the Mempawah Regency Land Office.

Keyword: Dispute, Mediation, Regulation